



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
Dari : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
Nomor :
Tanggal : 13 April 2026
Lampiran : -
Perihal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/ kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil Keputusan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa periode berikutnya maupun program/ kegiatan yang sedang berjalan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini difokuskan pada pemantauan dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan I Tahun 2026. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh Gambaran hasil capaian riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan I Tahun 2026 termasuk didalamnya perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggung jawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kegiatan yang dihadapi diharapkan dari hasil monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya untuk menjalankan tugas yang efektif dan efisien.

Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatkan perekonomian sektor perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	%	5,68	Triwulan 1	0,74	0,74	100	Tercapai
					Triwulan 2	2,00			
					Triwulan 3	2,00			
					Triwulan 4	5,68			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	4,22	Triwulan 1	4,22	4,55	108	Tercapai
					Triwulan 2	4,55			
					Triwulan 3	4,55			
					Triwulan 4	4,56			
		Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	80,04	Triwulan 1	79,41	79,41	100	Tercapai
					Triwulan 2	79,41			
					Triwulan 3	79,41			
					Triwulan 4	80,04			
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Ton	62.072,89	Triwulan 1	16532,38	13309,70	81	Belum tercapai
					Triwulan 2	31562,11			
					Triwulan 3	47106,09			
					Triwulan 4	62072,86			
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	%	4	Triwulan 1	1	1,01	101	Tercapai
					Triwulan 2	2			
					Triwulan 3	3			
					Triwulan 4	4			

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.343.149.314 dari Target alokasi anggaran sebesar Rp. 9.043.963.636 atau capaian sekitar 14,85% dari target yang direncanakan. Adapun hasil money capaian kinerja pada program dan kegiatan diperoleh sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub kegiatan (Suboutput)	Rencana Aksi Triwulan I		Capaian Realisasi		Persentase Capaian
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Kelautan dan Perikanan (persen)	91,66	5.038.963.636	91,66	1.096.827.939	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan tahapan waktu (dokumen)	6	10.000.000	3	2.851.850	50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	2	2.500.000	1	1.264.500	50
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	2.500.000	1	732.000	50
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	2.500.000	1	855.350	50
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	0	2.500.000	0	0	0
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah (Dokumen)	3	4.304.359.636	3	1.006.994.724	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	28	3.983.782.451	28	927.546.959	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	3	318.077.185	3	79.447.765	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	0	2.500.000	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	0	5.000.000	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	0	5.000.000	0	0	0

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian DINLUKAN (persen)	0	105.000.000	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	105.000.000	0	0	0
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi umum (persen)	40	153.000.000	14	22.064.800	35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	8	5.000.000	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	19	50.000.000	0	9.714.800	0
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	9	6.000.000	0	0	0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	1	5.000.000	1	1.613.100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	4	5.000.000	0	1.826.900	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	82.000.000	1	8.910.000	100
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (unit)	0	25.500.000	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	25.500.000	0	0	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (persen)	10	128.000.000	26	33.261.065	260
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	3.000.000	1	750.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	125.000.000	1	32.511.065	100
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (persen)	20	308.104.000	10	31.655.500	50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	0	84.350.000	1	9.380.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya (unit)	5	65.150.000	7	19.853.500	140
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0	143.604.000	0	2.422.000	0

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3	7.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0	7.500.000	0	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	1296,58	960.000.000	1119,2	97.919.850	88,31
	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (paket)	2	595.000.000	2,000	86.380.100	100
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1	95.000.000	1	7.894.500	100
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	16	90.000.000	2	76.310.600	12,5
	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	0	410.000.000	0	2.175.000	0
	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	0	135.000.000	0	0	0
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	0	100.000.000	0	0	0
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	0	35.000.000	0	0	0
	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah TPI yang tersedia (TPI)	2	230.000.000	1	11.539.750	50
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (dokumen)	2	30.000.000	0	1.771.750	0
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	2	200.000.000	1	9.768.000	50
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	15355,83	1.950.000.000	11929,97	131.294.025	77,69
	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Cakupan bina kelompok pembudi daya (kelompok)	0	508.000.000	0	94.833.025	0
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	0	55.000.000	0	-	0

	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	10	453.000.000	0	94.833.025	0
	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Sarana dan prasarana pembudidaya Ikan yang tersedia (paket)	0	1.442.000.000	1	36.461.000	0
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	0	1.165.000.000	0	0	0
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	2	277.000.000	1	36.461.000	50
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Persen)	5	40.000.000	0	4.350.000	0
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	40.000.000	0	4.350.000	0
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang di periksa kepatuhannya sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)	0	10.000.000	0	0	0
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan / atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai ke wenangan (Pelaku Usaha) kabupaten/ kota	10	10.000.000	0	4.350.000	0
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan (Pelaku Usaha) kabupaten/ kota	0	20.000.000	0	0	0
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	5855	1.055.000.000	0	12.757.500	0
	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Pohlhasar yang terbina pada produk olahan perikanan (orang)	0	160.000.000	0	3.360.000	0
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit usaha)	0	160.000.000	0	3.360.000	0

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan (KG)	0	895.000.000	0	9.397.500	0
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0	60.000.000	0	0	0
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	2	835.000.000	0	9.397.500	0

Dari capaian tersebut pada tabel di atas rata-rata persentase capaian sekitar 32,97%, tetapi masih terdapat program yang masih dibawah rata-rata sehingga dapat dijelaskan mengenai pendukung dan hambatan yang ada sebagai berikut:

Pendukung dan Hambatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (IKM Dinas Kelautan dan Perikanan)

Alokasi anggaran Rp 5.038.963.636 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 1.096.827.939 atau mencapai 21,77%. Program ini memiliki indikator kinerja IKM Dinas Kelautan dan Perikanan dengan target 91,7 terealisasi 91,66 atau mencapai 91,96%. Pelaksanaan penilaian IKM Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan pada setiap semesteran. Pada Triwulan I, pelaksanaan rencana aksi difokuskan pada penguatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan sarana pendukung pelayanan guna membangun fondasi awal peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat perikanan di Kabupaten Demak. Adapun rencana aksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. **Reviu dan Penyempurnaan Standar Pelayanan**

Melakukan evaluasi dan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada layanan utama seperti pelayanan perizinan usaha perikanan, fasilitasi bantuan sarana prasarana, dan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta memastikan keterbukaan informasi alur layanan kepada masyarakat.
 - b. **Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan**

Melaksanakan pembinaan internal kepada petugas pelayanan melalui kegiatan peningkatan kompetensi dasar pelayanan prima, etika pelayanan publik, serta pemahaman teknis pelayanan sektor kelautan dan perikanan.
 - c. **Penguatan Layanan Berbasis Digital**

Mengoptimalkan media informasi dan komunikasi pelayanan melalui website atau media sosial resmi, serta menyediakan kanal pengaduan masyarakat berbasis digital untuk mempermudah akses layanan dan penyampaian keluhan.
 - d. **Pembenahan Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman, penyediaan papan informasi layanan, serta peningkatan fasilitas pendukung bagi masyarakat pengguna layanan agar tercipta pelayanan yang transparan dan ramah pengguna.

e. Pelaksanaan Survei IKM sebagai Data Awal (*Baseline*)

Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada awal tahun untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan.

f. Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Survei

Mengidentifikasi unsur pelayanan yang memiliki nilai rendah dari hasil survei IKM, kemudian menyusun langkah perbaikan awal (*quick wins*) yang dapat segera diimplementasikan pada triwulan berjalan.

g. Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Menyusun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang jelas dan terukur, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat dan terdokumentasi dengan baik.

Rencana aksi Triwulan I ini merupakan langkah strategis awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun faktor pendukung tersebut antara lain:

a. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

Adanya arahan dan dukungan pimpinan perangkat daerah dalam mendorong percepatan perbaikan pelayanan sejak awal tahun, termasuk dalam pengambilan kebijakan strategis dan pengalokasian sumber daya.

b. Kesiapan Perencanaan dan Dokumen Pendukung

Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja, standar pelayanan, serta rencana aksi yang jelas dan terukur menjadi dasar pelaksanaan kegiatan secara sistematis pada Triwulan I.

c. Ketersediaan SDM Pelayanan yang Memadai

Dukungan aparatur yang cukup baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, serta adanya pembinaan internal yang memperkuat pemahaman petugas terhadap standar pelayanan.

d. Ketersediaan SOP dan Standar Pelayanan

Telah tersedianya SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan sehingga memudahkan dalam proses reviu, penyederhanaan, dan implementasi perbaikan pada Triwulan I.

e. Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar

Tersedianya fasilitas pelayanan dasar seperti ruang layanan, media informasi, serta peralatan pendukung yang memungkinkan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang

Adanya penggunaan media digital (*website*, media sosial, atau aplikasi sederhana) sebagai sarana informasi dan pengaduan masyarakat yang mendukung percepatan pelayanan.

g. Partisipasi Masyarakat dalam Survei IKM

Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan melalui survei IKM menjadi faktor penting dalam memperoleh data awal (*baseline*) yang akurat.

h. Koordinasi Internal Antar Bidang

Terjalannya koordinasi yang baik antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan tindak lanjut hasil evaluasi secara terpadu.

i. Budaya Kerja Pelayanan Publik

Mulai terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terbuka terhadap masukan dan perbaikan.

Dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/ hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah:

- a. kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan, sehingga tindak lanjut atas hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum sepenuhnya terintegrasi dalam perbaikan layanan.
- b. Koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan pelayanan juga belum berjalan optimal, yang berdampak pada belum seragamnya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik turut menghambat kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan, sehingga berpengaruh terhadap persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Produksi perikanan tangkap (ton))

Capaian produksi perikanan tangkap mencapai 12,07% dari target, Alokasi anggaran Rp 960.000.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar 97.919.850 atau mencapai 10,20%.

Pada Triwulan I, target Produksi Perikanan Tangkap direncanakan mulai meningkat melalui optimalisasi jumlah trip melaut, pemanfaatan armada penangkapan, serta peningkatan volume pendaratan ikan baik di pelabuhan/TPI maupun non pelabuhan, termasuk kontribusi dari perairan umum daratan (PUD).

Rencana aksi pada Triwulan I difokuskan pada penguatan aktivitas awal penangkapan dan pencatatan produksi, yaitu:

- a. **Optimalisasi operasional nelayan** melalui fasilitasi sarana penangkapan dan dukungan kebutuhan melaut (BBM, logistik terbatas).
- b. **Perbaikan dan penataan sarana pendaratan (TPI/ pelabuhan)** termasuk normalisasi/pengerukan alur untuk memudahkan kapal bersandar.
- c. **Pendataan dan pencatatan produksi secara intensif** baik di pelabuhan maupun non pelabuhan untuk meningkatkan akurasi data.
- d. **Pembinaan dan pendampingan nelayan** terkait efisiensi penangkapan dan keselamatan melaut pada kondisi cuaca ekstrem.
- e. **Penguatan koordinasi dengan kelompok nelayan (KUB)** untuk mendorong pendaratan hasil tangkapan di wilayah sendiri.
- f. **Penyediaan informasi cuaca dan *fishing ground*** sebagai acuan nelayan dalam menentukan waktu dan lokasi penangkapan.

- g. **Monitoring dan evaluasi berkala** terhadap jumlah trip melaut dan volume produksi sebagai indikator antara.

Faktor pendukung pencapaian indikator Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan I antara lain

- a. Adanya upaya optimalisasi aktivitas penangkapan melalui peningkatan jumlah trip melaut dan pemanfaatan armada penangkapan yang tersedia;
- b. Dukungan sarana dan prasarana penangkapan serta pendaratan ikan, baik di pelabuhan/ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun non pelabuhan, turut mendorong peningkatan volume produksi;
- c. Ketersediaan sumber daya perikanan, termasuk kontribusi dari perairan umum daratan (PUD), juga menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal;
- d. Penguatan sistem pendataan dan pencatatan produksi, pembinaan dan pendampingan kepada nelayan, serta peningkatan koordinasi dengan kelompok usaha bersama (KUB) menjadi faktor penting dalam mendukung akurasi data dan peningkatan produksi;
- e. Dukungan informasi cuaca dan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) juga berperan dalam membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi penangkapan secara lebih efektif;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas penangkapan menjadi dasar dalam pengendalian dan perbaikan kinerja produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/ hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah:

- a. Produksi belum optimal akibat musim angin barat yang menyebabkan gelombang tinggi sehingga frekuensi melaut nelayan menurun;
- b. Pendangkalan alur pelabuhan/ TPI yang menghambat aktivitas sandar dan bongkar muat;
- c. Masih adanya nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan di luar wilayah sehingga data produksi tidak tercatat secara optimal;
- d. Keterbatasan sarana prasarana dan pencatatan produksi.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Produksi Perikanan Budidaya (ton))

Alokasi anggaran Rp 1.950.000.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 131.294.025 atau mencapai 6,73%. Program ini memiliki indikator kinerja Produksi perikanan budidaya dengan realisasi 11929,97 ton dari target 52910,52 ton mencapai 22,55%.

Pada Triwulan I, target kinerja Produksi Perikanan Budidaya difokuskan pada tahap awal siklus produksi, yaitu persiapan dan mulai berjalan proses budidaya. Kinerja yang direncanakan meliputi peningkatan luas tebar, penebaran benih, serta awal pemeliharaan. Sementara itu, kinerja nyata pada periode ini umumnya belum menunjukkan hasil produksi yang signifikan karena sebagian besar kegiatan masih dalam fase pembesaran.

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator Produksi Perikanan Budidaya, rencana aksi pada Triwulan I difokuskan pada kegiatan awal produksi sebagai berikut:

- a. **Persiapan lahan budidaya** melalui perbaikan tambak/ kolam, pengeringan, dan pengolahan dasar;
- b. **Penebaran benih unggul** sesuai dengan standar padat tebar untuk meningkatkan potensi produksi;
- c. **Distribusi bantuan sarana produksi** seperti benih dan pakan kepada pembudidaya;
- d. **Pendampingan teknis awal** terkait manajemen budidaya, kualitas air, dan pencegahan penyakit;
- e. **Monitoring dan pendataan awal** terhadap luas lahan aktif, jumlah pembudidaya, dan realisasi penebaran;
- f. **Koordinasi dengan kelompok pembudidaya (pokdakan)** untuk memastikan kesiapan siklus produksi berjalan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/ hambatan dalam pencapaian target kinerja akibat terjadinya banjir yang berdampak langsung pada kegiatan budidaya khususnya di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung. Banjir menyebabkan terendamnya tambak dan kolam sehingga terjadi penurunan kualitas air (salinitas tidak stabil, kadar oksigen menurun, dan meningkatnya kekeruhan) yang memicu stres dan kematian ikan/udang. Banyak komoditas yang terbawa arus (*loss produksi*), kerusakan tanggul dan infrastruktur tambak, serta terganggunya jadwal penebaran dan panen. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pembudidaya mengalami gagal panen atau menunda siklus produksi, sehingga realisasi produksi perikanan budidaya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berdampak pada rendahnya capaian kinerja pada periode berjalan

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (produksi pengolahan hasil perikanan (Ton))

Alokasi anggaran Rp 1.055.000.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 12.757.500 atau mencapai 1,21%. Program ini memiliki indikator kinerja produksi pengolahan hasil perikanan (Ton) dengan realisasi 0 ton dari target 27.660 ton.

Pada Triwulan I, kinerja yang direncanakan pada indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan difokuskan pada tahap awal peningkatan kapasitas dan aktivitas pengolahan, seperti persiapan produksi, peningkatan keterampilan pelaku usaha, serta mulai berjalan proses produksi olahan. Secara umum, kinerja nyata pada periode ini belum menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan karena sebagian pelaku usaha masih dalam tahap persiapan bahan baku, perbaikan peralatan, dan penyesuaian proses produksi. Namun demikian, capaian kinerja dapat dilihat dari indikator antara, seperti meningkatnya jumlah pelaku usaha yang aktif berproduksi, ketersediaan sarana pengolahan, serta mulai meningkatnya volume produksi awal. Apabila terjadi deviasi, hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan bahan baku, belum optimalnya kapasitas produksi, serta akses pasar yang masih terbatas pada awal tahun.

Rencana aksi pada Triwulan I difokuskan pada penguatan dasar kegiatan pengolahan dan pemasaran, yaitu:

- a. **Pendataan dan verifikasi pelaku usaha pengolahan (poklahsar/ UMKM)** untuk memastikan data produksi akurat dan terkini.
- b. **Pelaksanaan pelatihan teknis pengolahan** guna meningkatkan keterampilan dan kualitas produk olahan.
- c. **Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan** seperti alat produksi dan kemasan.
- d. **Pendampingan penerapan higiene dan mutu produk** untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.
- e. **Penguatan akses bahan baku** melalui koordinasi dengan nelayan dan pembudidaya agar ketersediaan bahan baku terjamin.
- f. **Promosi dan pemasaran awal** melalui pameran, bazar, maupun platform digital untuk membuka akses pasar.
- g. **Monitoring dan evaluasi produksi awal** guna memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Persen))

Alokasi anggaran Rp 40.000.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 4.350.000 atau mencapai 10,88%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan realisasi 0% dari target 75%.

Pada Triwulan I, kinerja yang direncanakan difokuskan pada peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan awal tahun, seperti inspeksi lapangan, serta sosialisasi regulasi. Target diarahkan pada meningkatnya jumlah pelaku usaha yang diperiksa dan bertambahnya pelaku usaha yang memenuhi seluruh ketentuan (izin, alat tangkap, dan praktik usaha).

Dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/ hambatan dalam pencapaian target kinerja pelaku usaha masih dalam tahap penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, serta keterbatasan jangkauan pengawasan di awal tahun. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki kelengkapan izin, penggunaan alat tangkap yang belum sesuai, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi, sehingga persentase kepatuhan belum maksimal.

Sehubungan dengan adanya kelemahan capaian kinerja sebagaimana uraian diatas maka dapat diberikan saran/ rekomendasi kepada penanggungjawab program/ kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bidang, melakukan penjadwalan dan pengendalian waktu penyusunan dokumen secara lebih efektif, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap sistem perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dan evaluasi internal secara berkala;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, melakukan penjadwalan dan pengendalian administrasi keuangan secara lebih tertib, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan dan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan dan evaluasi internal secara berkala;

- Meningkatkan koordinasi dan ketertiban administrasi kepegawaian, melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, serta mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Melakukan perencanaan kebutuhan administrasi secara lebih efektif dan efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
- Melakukan perencanaan kebutuhan BMD secara lebih cermat dan terukur, mengoptimalkan proses pengadaan agar lebih efektif dan efisien, serta memastikan kesesuaian spesifikasi barang yang diadakan dengan kebutuhan operasional perangkat daerah;
- Melakukan pengendalian dan efisiensi penggunaan listrik dan air di lingkungan kantor, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana secara bijak, serta melakukan penyesuaian perencanaan anggaran jasa penunjang agar lebih realistis sesuai dengan kebutuhan actual;
- Melakukan pemeliharaan aset secara berkala dan terjadwal, memprioritaskan pemeliharaan BMD yang bersifat mendesak dan menunjang pelayanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Optimalisasi operasional nelayan melalui fasilitasi sarana penangkapan dan dukungan kebutuhan melaut (BBM dan logistik terbatas);
- normalisasi/pengerukan alur pelabuhan/ TPI untuk memperlancar aktivitas sandar dan bongkar muat;
- peningkatan pendataan dan pencatatan produksi di pelabuhan maupun non pelabuhan;
- pembinaan dan pendampingan nelayan terkait efisiensi penangkapan dan keselamatan melaut;
- penguatan koordinasi dengan KUB agar pendaratan hasil tangkapan dilakukan di wilayah sendiri;
- penyediaan informasi cuaca dan fishing ground;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap jumlah trip melaut dan volume produksi.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- **Perbaikan dan penguatan infrastruktur tambak**

Dilakukan melalui rehabilitasi tanggul, peninggian pematang, serta perbaikan saluran air (*inlet-outlet*) untuk mencegah masuknya air banjir secara langsung ke area budidaya.

- **Pengelolaan kualitas air secara intensif**

Melalui penggunaan kincir air/ aerator untuk meningkatkan oksigen terlarut, aplikasi probiotik, serta pengaturan sirkulasi air guna menjaga stabilitas salinitas dan menekan kekeruhan.

- **Penerapan sistem budidaya adaptif terhadap banjir**

Seperti penggunaan tambak semi-intensif/intensif, pemasangan jaring pengaman (*screen/net*) pada saluran air untuk mencegah ikan/ udang terbawa arus, serta penyesuaian waktu tebar dan panen.

- **Bantuan sarana produksi dan stimulan usaha**

Pemberian bantuan benih, pakan, dan sarana produksi lainnya bagi pembudidaya terdampak untuk mempercepat pemulihan siklus produksi pascabanjir.

- **Pendampingan teknis dan mitigasi risiko**

Melalui penyuluhan dan pendampingan kepada pembudidaya terkait manajemen budidaya saat kondisi ekstrem, termasuk strategi pencegahan penyakit dan pengurangan risiko kerugian.

- **Penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi wilayah**

Melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk penyediaan informasi cuaca dan potensi banjir, sehingga pembudidaya dapat melakukan langkah antisipatif lebih awal.

- **Pengembangan kawasan budidaya yang lebih tahan terhadap banjir**

Secara bertahap dilakukan penataan kawasan budidaya, termasuk relokasi atau pengembangan sistem budidaya berbasis teknologi (misalnya kolam terpal atau bioflok) pada area yang lebih aman.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penguatan dasar kegiatan pengolahan dan pemasaran, yaitu:

- Pendataan dan verifikasi pelaku usaha pengolahan (poklahsar/ UMKM) untuk memastikan data produksi akurat dan terkini;
- Pelaksanaan pelatihan teknis pengolahan guna meningkatkan keterampilan dan kualitas produk olahan;
- Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan seperti alat produksi dan kemasan;
- Pendampingan penerapan higiene dan mutu produk untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan;
- Penguatan akses bahan baku melalui koordinasi dengan nelayan dan pembudidaya agar ketersediaan bahan baku terjamin;
- Promosi dan pemasaran awal melalui pameran, bazar, maupun platform digital untuk membuka akses pasar;
- Monitoring dan evaluasi produksi awal

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan perizinan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta regulasi yang berlaku secara berkelanjutan dan menyasar langsung kepada pelaku usaha;
- Penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran petugas di lapangan, pemanfaatan teknologi monitoring;

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna memperluas jangkauan pengawasan. Pendampingan teknis kepada pelaku usaha agar segera memenuhi kelengkapan administrasi;
- Pendekatan pembinaan yang persuasif dan bertahap disertai penegakan aturan secara konsisten guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga capaian indikator kepatuhan dapat lebih optimal.

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Selaku Ketua Tim Monev

Mochammad Arifin, SE, M.M.
NIP 197503251999031008

Mengetahui Tim Monev :

1. Ir. Nanang Tasunar David Narutomo, MM (Penanggungjawab)
2. Mita Arumsari, S.Pi. (Sekretaris)
3. Setio Hartono, S.Pi, MM (Anggota)
4. Budiono, S.Pi. (Anggota)
5. Siti Sunarti, S.Pi. (Anggota)
6. Ali Khamdan, SE (Anggota)





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

BERITA ACARA PENYAMPAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pada hari ini Senin, tanggal 13 April 2026 telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi capaian program pada Triwulan I Tahun 2026. Dari hasil monev capaian kinerja program terdapat adanya permasalahan/ kendala rendahnya capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, maka kepada masing-masing penanggungjawab program segera melaksanakan saran/ rekomendasi sebagai Upaya penyelesaian hambatan dengan uraian sebagai berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Dinas Kelautan dan Perikanan	100	21,77	- kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan, sehingga tindak lanjut atas hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum sepenuhnya terintegrasi dalam perbaikan layanan. - koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan pelayanan juga belum berjalan optimal, yang berdampak pada belum seragamnya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. - keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik turut menghambat kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan, sehingga berpengaruh	- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bidang, melakukan penjadwalan dan pengendalian waktu penyusunan dokumen secara lebih efektif, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap sistem perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dan evaluasi internal secara berkala; - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, melakukan penjadwalan dan pengendalian administrasi keuangan secara lebih tertib, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan dan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan dan evaluasi internal secara berkala; - Meningkatkan koordinasi dan ketertiban administrasi kepegawaian, melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, serta mendorong peningkatan

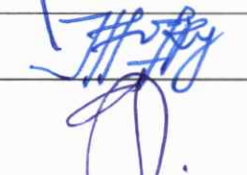
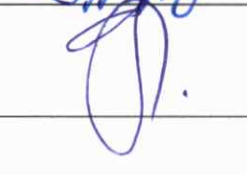
					terhadap persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan.	kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi; - Melakukan perencanaan kebutuhan administrasi secara lebih efektif dan efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia; - Melakukan perencanaan kebutuhan BMD secara lebih cermat dan terukur, mengoptimalkan proses pengadaan agar lebih efektif dan efisien, serta memastikan kesesuaian spesifikasi barang yang diadakan dengan kebutuhan operasional perangkat daerah; - Melakukan pengendalian dan efisiensi penggunaan listrik dan air di lingkungan kantor, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana secara bijak, serta melakukan penyesuaian perencanaan anggaran jasa penunjang agar lebih realistis sesuai dengan kebutuhan actual; - Melakukan pemeliharaan aset secara berkala dan terjadwal, memprioritaskan pemeliharaan BMD yang bersifat mendesak dan menunjang pelayanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	86,30	10,19	- Produksi belum optimal akibat musim angin barat yang menyebabkan gelombang tinggi sehingga frekuensi melaut nelayan menurun;	- Optimalisasi operasional nelayan melalui fasilitasi sarana penangkapan dan dukungan kebutuhan melaut (BBM dan logistik terbatas); - normalisasi/pengerukan alur pelabuhan/ TPI untuk memperlancar

					- Pendangkalan alur pelabuhan/ TPI yang menghambat aktivitas sandar dan bongkar muat; - Masih adanya nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan di luar wilayah sehingga data produksi tidak tercatat secara optimal; - Keterbatasan sarana prasarana dan pencatatan produksi	aktivitas sandar dan bongkar muat; - peningkatan pendataan dan pencatatan produksi di pelabuhan maupun non pelabuhan; - pembinaan dan pendampingan nelayan terkait efisiensi penangkapan dan keselamatan melaut; - penguatan koordinasi dengan KUB agar pendaratan hasil tangkapan dilakukan di wilayah sendiri; - penyediaan informasi cuaca dan fishing ground; - pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap jumlah trip melaut dan volume produksi.
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	77,69	2,53	- Produksi belum optimal akibat musim angin barat yang menyebabkan gelombang tinggi sehingga frekuensi melaut nelayan menurun; - Pendangkalan alur pelabuhan/ TPI yang menghambat aktivitas sandar dan bongkar muat; - Masih adanya nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan di luar wilayah sehingga data produksi tidak tercatat secara optimal; - Keterbatasan sarana prasarana dan pencatatan produksi.	- Perbaikan dan penguatan infrastruktur tambak - Pengelolaan kualitas air secara intensif - Penerapan sistem budidaya adaptif terhadap banjir - Bantuan sarana produksi dan stimulan usaha - Pendampingan teknis dan mitigasi risiko - Penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi wilayah - Pengembangan kawasan budidaya yang lebih tahan terhadap banjir
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	produksi pengolahan hasil perikanan	0	1,21	- keterbatasan bahan baku, belum optimalnya kapasitas produksi, serta akses pasar yang masih terbatas pada awal tahun	- Pendataan dan verifikasi pelaku usaha pengolahan (poklhasar/ UMKM) untuk memastikan data produksi akurat dan terkini; - Pelaksanaan pelatihan teknis pengolahan guna meningkatkan keterampilan dan kualitas produk olahan; - Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan seperti alat produksi dan kemasan; - Pendampingan penerapan higiene dan mutu produk untuk meningkatkan kualitas

						dan keamanan pangan; - Penguatan akses bahan baku melalui koordinasi dengan nelayan dan pembudidaya agar ketersediaan bahan baku terjamin; - Promosi dan pemasaran awal melalui pameran, bazar, maupun platform digital untuk membuka akses pasar; - Monitoring dan evaluasi produksi awal
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	0	10,88	- pelaku usaha masih dalam tahap penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, serta keterbatasan jangkauan pengawasan di awal tahun. - pelaku usaha yang belum memiliki kelengkapan izin, penggunaan alat tangkap yang belum sesuai, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, sehingga persentase kepatuhan belum maksimal.	- Peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan perizinan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta regulasi yang berlaku secara berkelanjutan dan menyasar langsung kepada pelaku usaha; - Penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran petugas di lapangan, pemanfaatan teknologi monitoring; - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna memperluas jangkauan pengawasan. Pendampingan teknis kepada pelaku usaha agar segera memenuhi kelengkapan administrasi; - Pendekatan pembinaan yang persuasif dan bertahap disertai penegakan aturan secara konsisten guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga capaian indikator kepatuhan dapat lebih optimal.

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani Tim Monev dan penanggungjawab program.

Tim Monev dan Penanggungjawab Program

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Nanang Tasunar David Narutomo, MM	Kepala Dinas (Penanggung Jawab)	
2	Mochammad Arifin, SE, M.M	Sekretaris (Ketua)	
3	Mita Arumsari, S.Pi.	Plt. Kasubbag Program dan Keuangan (Sekretaris)	
4	Setio Hartono, S.Pi, MM	Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
5	Budiono, S.Pi.	Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
6	Siti Sunarti, S.Pi.	Plt. Kepala Bidang Budidaya	
7	Ali Khamdan, SE	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026
TRIWULAN I

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah an di Dinas Kelautan dan Perikanan	80,04	79,41	79,41	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Kelautan dan Perikanan (persen)	91,7	91,66	91,66	100	5.038.963.636	163.318.454	1.096.827.939	671,59		Sekretaris
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan tahapan waktu (dokumen)	9	6	3	50	10.000.000	2.315.000	2.851.850	123,19		Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	2	2	1	50	2.500.000	0	1.264.500	100		Penata Layanan Operasional
							Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	2	1	50	2.500.000	750.000	732.000	97,60		Pengadministrasi Perkantoran
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	2	1	50	2.500.000	885.000	855.350	96,65		Pengadministrasi Perkantoran
							Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	0	0	0	2.500.000	680.000	-	0,00		Penata Layanan Operasional
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah (Dokumen)	12	3	3	100	4.304.359.636	-	1.006.994.724	100,00		Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	28	28	28	100	3.983.782.451	1.550.854.000	927.546.959	59,81		Penata Layanan Operasional
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	3	3	100	318.077.185	126.300.000,000	79.447.765	62,90		Penata Layanan Operasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	0	0	0	2.500.000	2.500.000,00		0,00		Penata Layanan Operasional
	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	4,22	4,22	4,55	107,82		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	0	0	0	5.000.000	-	-	0,00		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	0	0	0	5.000.000	-	-	0,00		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian D I N L U T K A N (persen)	100	0	0	0	105.000.000	-	-	0,00		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	50	0	0	0	105.000.000	-	-	0,00		Pranata komputer Ahli Pertama
							ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi umum (persen)	100	40	14	35	163.000.000	58.340.000,0	22.064.800	37,82		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	8	0	0	5.000.000	2.250.000		0,00		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	47	19	0	0	50.000.000	19.710.000	9.714.800	49,29		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	20	9	0	0	6.000.000	2.550.000		0,00		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	1	1	1	100	5.000.000	5.000.000	1.613.100	32,26		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	10	4	0	0	5.000.000	1.500.000	1.826.900	121,79		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	1	1	100	82.000.000	27.330.000	8.910.000	32,60		Analisis Pasar Hasil Periklanan Ahli Pertama
							PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (unit)	8	0	0	0	25.500.000	-	-	0,00		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5	0	0	0	25.500.000	-	-	0,00		Analisis Pasar Hasil Periklanan Ahli Pertama
							PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (persen)	100	10	26	260	128.000.000	32.254.000	33.261.065	103,12		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	4	1	1	100	3.000.000	1.000.000	750.000	75,00		Penata Layanan Operasional
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	1	1	100	125.000.000	31.254.000	32.511.065	104,02		Penata Layanan Operasional
							PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (persen)	100	20	10	50	308.104.000	70.409.454	31.655.500	44,96		Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	0	1	100	84.350.000	31.631.250	9.380.000	29,65		Operator Layanan Operasional
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	5	7	140	65.150.000	24.431.250	19.853.500	81,26		Operator Layanan Operasional
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	0	0	0	143.604.000	8.440.704	2.422.000	28,69		Operator Layanan Operasional
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	15	3	0	0	7.500.000	3.087.500	-	0,00		Operator Layanan Operasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi (unit)	18	0	0	0	7.500.000	2.818.750		0,00		Operator Layanan Operasional
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	62.072,86	16.532,38	13.309,70	80,51		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	9272,82	1296,58	1119,2	86,319	960.000.000	229.395.000	97.919.850	42,69		Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
							PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GEMANGAH AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (paket)	31	2	2.000	100	595.000.000	196.215.000	86.380.100	44,02		Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli muda
							Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1	1	1	100	95.000.000	90.760.000	7.894.500	8,70		Penata Layanan Operasional
							Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	16	16	2	12,5	90.000.000	90.000.000	76.310.600	84,79		Penata Layanan Operasional
							Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	15	0	0	0	410.000.000	15.455.000	2.175.000	14,07		Penelaah Teknis Kebijakan
							PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	35	0	0	0	135.000.000	-	-	0,00		Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
							Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	30	0	0	0	100.000.000	-	-	0,00		Penata Kelola Kelautan dan Perikanan
							Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	5	0	0	0	35.000.000	-	-	0,00		Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama
							PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah TPI yang tersedia (TPI)	2	2	1	50	230.000.000	33.180.000	11.539.750	34,78		Pengawas Perikanan
							Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (dokumen)	2	2	0	0	30.000.000	14.930.000	1.771.750	11,87		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	2	2	1	50	200.000.000	18.250.000	9.768.000	53,52		Pengawas Perikanan Ahli Pertama
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	52910,52	15355,83	11929,97	77,69	1.950.000.000	597.145.000	131.294.025	21,99		Plt. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
							PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Cakupan bina kelompok pembudi daya (kelompok)	30	0	0	0	508.000.000	440.930.000	94.833.025	21,51		
							Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	10	0	0	0	55.000.000	-	-	0,00		Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama
							Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	20	10	0	0	453.000.000	440.930.000	94.833.025	21,51		Analisis Perikanan Budidaya
							PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (paket)	14	0	1	100	1.442.000.000	156.215.000	36.461.000	23,34		Pengendali hawa dan penyakit ikan ahli muda
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	8	0	0	0	1.165.000.000	78.900.000	-	0,00		Analisis Perikanan Budidaya
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	6	2	1	50	277.000.000	77.315.000	36.461.000	47,16		Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Persen)	75	5	0	0	40.000.000	40.000.000	4.350.000	10,88		Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
							Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	0	0	40.000.000	40.000.000	4.350.000	10,88		Pengawas Perikanan Ahli Pertama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang di periksa kepatuhannya sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)	50	0	0	0	10.000.000	10.000.000	-	0,00		Pengawas Perikanan Ahli Pertama
							Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan (Pelaku Usaha) kabupaten/ kota	50	10	0	0	10.000.000	10.000.000	4.350.000	43,50		Pengawas Perikanan Ahli Pertama
							Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan (Pelaku Usaha) kabupaten/ kota	50	0	0	0	20.000.000	20.000.000	-	0,00		Pengawas Perikanan Ahli Pertama
Meningkatkan ya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	4	1	1,01	101		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	27.660	5855	10	0,1708	1.055.000.000	160.108.000	12.757.500	7,97		Pjt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Pembina yang terbina pada produk olahan perikanan (orang)	40	0	1	100	160.000.000	-	3.360.000	100		Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
							Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit usaha)	80	0	0	0	160.000.000	-	3.360.000	0,00		Penata Layanan Operasional
							PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan (KG)	1125	0	15	100	895.000.000	160.108.000	9.397.500	5,87		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahunan	Capaian Anggaran Triwulan I			Keterangan	Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1,125	0	0	0	60.000.000	-	-	0,00		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
							Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	50	2	0	0	835.000.000	160.108.000	9.397.500	5,87		Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
													9.043.963.636		1.343.149.314			

Faktor Pendorong Tercapainya Target :

Uraian Permasalahan (target tidak tercapai) : Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Demak belum optimal sehingga mempengaruhi capaian kinerja Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya , khususnya di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung, akibat terjadinya banjir yang berdampak langsung pada kegiatan budidaya.

Banjir menyebabkan terendamnya tambak dan kolam sehingga terjadi penurunan kualitas air (salinitas tidak stabil, kadar oksigen menurun, dan meningkatnya kekeruhan) yang memicu stres dan kematian ikan/udang. Selain itu, banyak komoditas yang terbawa arus (loss produksi), kerusakan tanggul dan infrastruktur tambak, serta terganggunya jadwal penebaran dan panen. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pembudidaya mengalami gagal panen atau menunda siklus produksi, sehingga realisasi produksi perikanan budidaya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berdampak pada rendahnya capaian kinerja pada periode berjalan

Rencana Tindak Lanjut :

- Perbaikan dan penguatan infrastruktur tambak**
Dilakukan melalui rehabilitasi tanggul, peninggian pematang, serta perbaikan saluran air (inlet-outlet) untuk mencegah masuknya air banjir secara langsung ke area budidaya.
- Pengelolaan kualitas air secara intensif**
Melalui penggunaan kincir air/aerator untuk meningkatkan oksigen terlarut, aplikasi probiotik, serta pengaturan sirkulasi air guna menjaga stabilitas salinitas dan menekan kekeruhan.
- Penerapan sistem budidaya adaptif terhadap banjir**
Seperti penggunaan tambak semi-intensif/intensif, pemasangan jaring pengaman (screen/net) pada saluran air untuk mencegah ikan/udang terbawa arus, serta penyesuaian waktu tebar dan panen.
- Bantuan sarana produksi dan stimulan usaha**
Pemberian bantuan benih, pakan, dan sarana produksi lainnya bagi pembudidaya terdampak untuk mempercepat pemulihan siklus produksi pascabanjir.
- Pendampingan teknis dan mitigasi risiko**
Melalui penyuluhan dan pendampingan kepada pembudidaya terkait manajemen budidaya saat kondisi ekstrem, termasuk strategi pencegahan penyakit dan pengurangan risiko kerugian.
- Penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi wilayah**
Melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk penyediaan informasi cuaca dan potensi banjir, sehingga pembudidaya dapat melakukan langkah antisipatif lebih awal.
- Pengembangan kawasan budidaya yang lebih tahan terhadap banjir**
Secara bertahap dilakukan penataan kawasan budidaya, termasuk relokasi atau pengembangan sistem budidaya berbasis teknologi (misalnya kolam terpal atau bioflok) pada area yang lebih aman.